

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara adalah tujuan utama bagi banyak pemerintah diseluruh dunia. Namun, pemahaman tentang pembangunan ekonomi telah berkembang seiring berjalannya waktu tidak hanya melibatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi pendapatan yang adil dan inklusif. Dalam pembangunan ekonomi, terdapat permasalahan utama yang meliputi peningkatan Gross Domestic Product (GDP), pengurangan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan.

Todaro dan smith (2011), menjelaskan bahwa Pembangunan ekonomi dalam lingkup yang lebih luas dilihat sebagai sebuah perubahan fundamental dalam struktur sosial, pergeseran dalam sikap masyarakat, upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, dan tindakan konkret dalam mengatasi kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan mencerminkan perbedaan distribusi pendapatan antar individu, kelompok, atau wilayah dalam suatu negara. Ketimpangan pendapatan telah menjadi isu umum yang dihadapi oleh berbagai negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. Menurut Laporan PBB dalam World Economic Situation and Prospects (2023) Mengungkapkan bahwa banyak negara mengalami ketimpangan pendapatan yang lebih besar, dengan koefisien gini yang meningkat sejak merebaknya pandemi dalam tiga tahun terakhir.

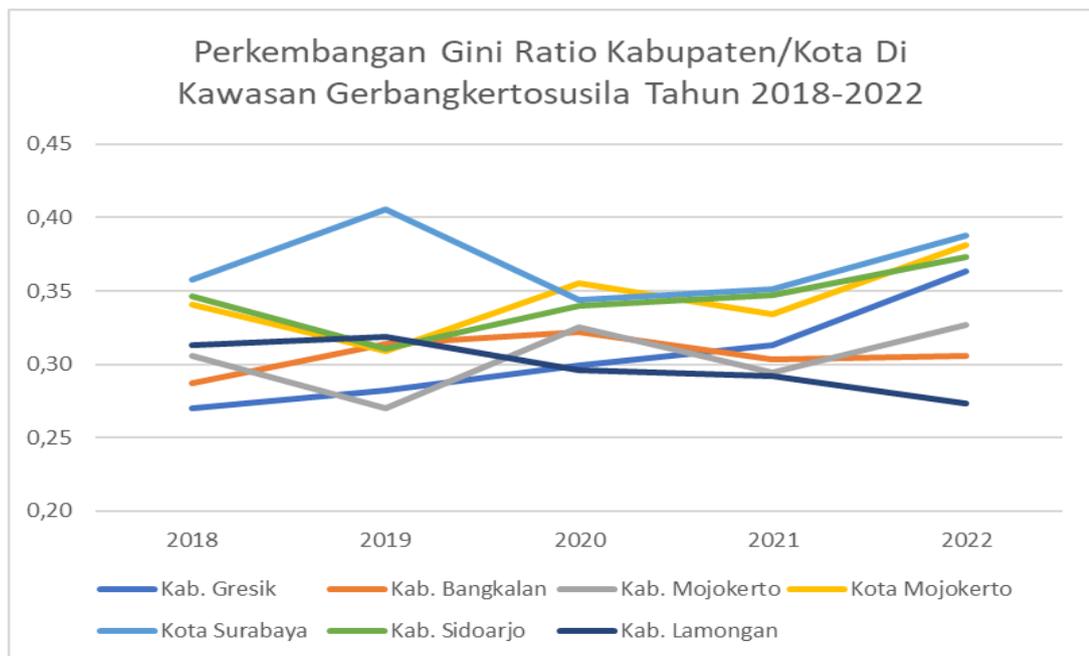
Seiring berjalannya waktu, ketimpangan pendapatan telah menjadi perdebatan yang semakin mendalam. Ada pandangan yang berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan adalah konsekuensi alami dari pasar bebas dan merupakan insentif bagi individu untuk bekerja lebih keras dan berinvestasi dalam pendidikan serta peningkatan kemampuan. Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat mengarah pada ketidakadilan sosial dan ekonomi yang merugikan banyak orang.

Pada awalnya, ketimpangan mungkin tidak berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah mencapai ambang batas akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi (Yumna dkk., 2014). Ambang batas mengacu pada tingkat atau level tertentu dari ketimpangan yang dapat bertindak sebagai pemicu atau batas di mana dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi signifikan atau lebih terasa. Peningkatan pesat dalam pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin besar dalam distribusi pendapatan. (Wahed dkk., 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan distribusi pendapatan dan kecepatan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam hipotesis Kuznets menyatakan bahwa di awal tahap pembangunan ekonomi suatu negara, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah mencapai tahap tertentu, yakni ketika ekonomi telah berkembang dan mencapai tingkat pendapatan lebih tinggi secara keseluruhan, ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Hipotesis ini menyiratkan bahwa ada suatu hubungan dari ketimpangan pendapatan dengan

pertumbuhan ekonomi yang mengalami perubahan seiring waktu (Kuncoro, 2004).

Ketimpangan pendapatan telah mengidentifikasi bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan bisa muncul akibat perbedaan dalam akses terhadap sumber daya (Kataoka, 2013), variasi aktivitas sektoral yang berbeda (Bogliaccini & Egan, 2017), tingkat akses yang berbeda terhadap layanan seperti Pendidikan (Tomul, 2009), keuangan, teknologi, dan kesehatan (Esquivias dkk., 2021). Akibat dari ketidaksetaraan distribusi sumber daya, akumulasi perkembangan ekonomi yang lebih tinggi sering terjadi di wilayah yang lebih kaya dan terhubung dengan baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang makmur dan lebih terpencil.



Sumber : BPS, 2023 data diolah

Gambar 1.1 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2018-2022

Parameter yang sering digunakan untuk menilai ketimpangan adalah Gini rasio. Gini rasio merupakan indikator agregat yang digunakan untuk mengukur kekayaan dalam suatu populasi atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Kisaran nilai Gini rasio biasanya antara nol dan satu. Apabila nilai indeks Gini rasio mendekati nol maka hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah atau distribusi yang semakin merata, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi atau ketimpangan yang besar.

Indeks Gini yang menonjol tercatat di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Misalnya, Kota Surabaya yang memiliki indeks Gini tertinggi sebesar 0,388, jauh melebihi indeks Gini Provinsi Jawa Timur sebesar 0,371. Ini mencerminkan ketimpangan pendapatan yang sangat signifikan di kota ini, bahkan lebih tinggi dari tingkat ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi. Di sisi lain, Kabupaten Lamongan memiliki Gini Ratio terendah pada tahun yang sama, yaitu sekitar 0,273. Ini menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah, yang bisa menjadi hasil dari pembangunan ekonomi yang lebih merata atau program-program sosial yang mendukung pemerataan pendapatan. Menurut Michael P. Todaro dan Smith (2006) dalam (Judan, 2018), ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi akan membawa dampak yang beragam. Dampak-dampak ini mencakup inefisiensi dalam ekonomi, pengurangan stabilitas sosial, dan berpotensi mengancam solidaritas masyarakat karena dianggap tidak adil.

Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah seringkali dapat dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga cenderung tidak berpengaruh ke Masyarakat yang kurang beruntung. Kebijakan dibidang industri juga seringkali lebih membantu pengusaha yang lebih besar daripada pengusaha kecil, dan pekerja

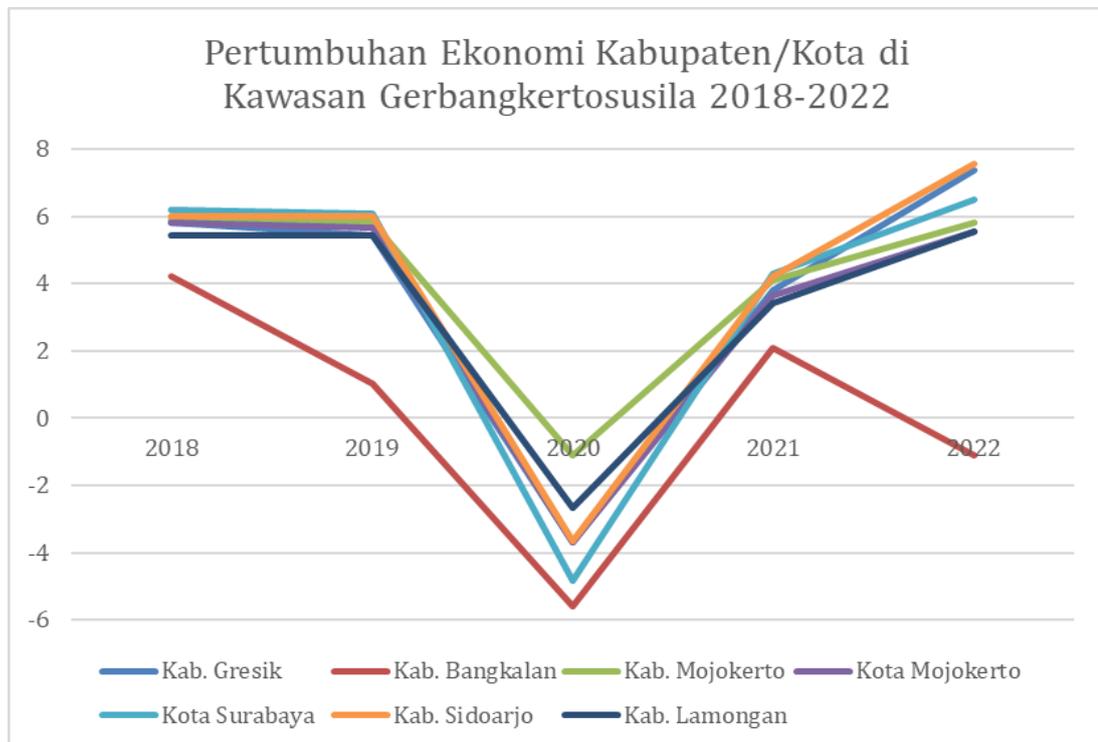
yang lebih terampil dibandingkan dengan pekerja yang kurang terampil (Lee & Wie, 2013).

Menurut laporan dari International NGO Forum on Indonesia (INFID) dan Oxfam Indonesia, kekayaan yang dimiliki oleh empat individu paling kaya di Indonesia setara dengan kekayaan yang dimiliki oleh 100 juta orang termiskin di Indonesia. Hasil survei mereka menunjukkan bahwa satu persen dari populasi terkaya Indonesia menguasai sekitar 49,3 persen dari total kekayaan nasional. Bahkan, 10 persen dari orang-orang terkaya tersebut memiliki kontrol atas sekitar 75,7 persen dari seluruh kekayaan nasional. Oleh karena itu di Indonesia masalah masalah ketimpangan cukup serius dalam perekonomian.

Teori *trickle-down* merupakan teori yang menyatakan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi lebih dahulu dirasa oleh penduduk kaya, setelah itu tahap selanjutnya penduduk miskin mulai mendapatkan manfaatnya ketika penduduk kaya menyalurkan hasil pertumbuhan ekonomi mereka peroleh tersebut.

Teori efek *trickle-down* tersebut mengimplikasikan sekelompok masyarakat yang memperoleh kemajuan akan secara alami menetes ke bawah, menciptakan berbagai peluang ekonomi dan lapangan kerja yang nantinya akan mendukung penyaluran hasil pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dalam teori ini, Pertumbuhan ekonomi disertai dengan aliran vertikal dari pendapatan yang awalnya menguntungkan penduduk yang lebih kaya ke penduduk yang kurang mampu secara bertahap. Artinya bahwa apabila manfaat yang diterima oleh penduduk miskin dari hasil pertumbuhan ekonomi hanya sedikit, kemiskinan hanya berkurang dalam skala yang sangat terbatas. Situasi seperti ini berpeluang untuk meningkatnya tingkat kemiskinan yang merupakan akibat dari ketimpangan pendapatan yang

semakin membesar yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih menguntungkan penduduk kaya daripada penduduk miskin.



Sumber : BPS, 2023 data diolah

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2018-2022.

Dari gambar 1.2 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila mengalami fluktuasi yang signifikan dan masih belum merata di setiap kabupaten dan kota pada Kawasan tersebut. Data pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten dan kota di Gerbangkertosusila selama periode 2018-2022, pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi terjadi pada Kabupaten Gresik pada tahun 2022 yaitu angka pertumbuhan sebesar 7.38%. Hal ini menunjukkan bahwa Gresik mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain selama periode tersebut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 dengan angka pertumbuhan sebesar -1.12%. Ini menandakan bahwa Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan ekonomi pada

tahun tersebut dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Peningkatan dari pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Gerbangkertosusila cenderung diikuti dengan peningkatan gini ratio di Kawasan tersebut sehingga perlu perhatian khusus bagi pemangku kebijakan agar tidak hanya fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi namun juga pemerataan pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila.

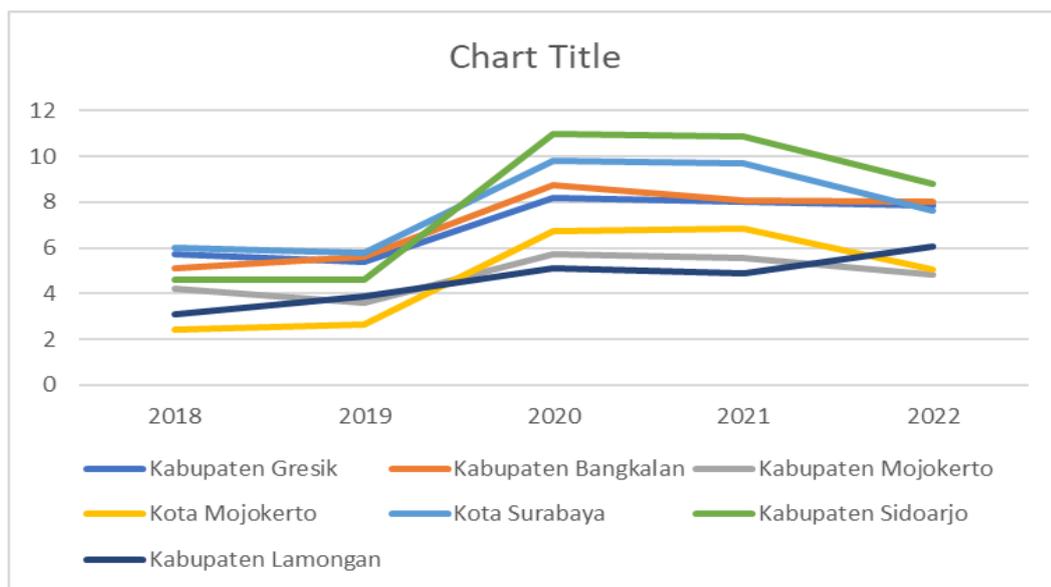
Perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi antara kabupaten dan kota di wilayah ini berpotensi menciptakan ketimpangan pendapatan yang signifikan antara wilayah-wilayah kabupaten dan kota dalam kawasan ini.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang, menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja. Dalam situasi ini, terdapat surplus tenaga kerja yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak individu yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini dapat menciptakan ketimpangan pendapatan di masyarakat karena sebagian besar pendapatan individu berasal dari pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang mencukupi juga harus diimbangi dengan kemampuan dan kualifikasi tenaga kerja. Mutu kerja mencakup aspek ketrampilan, pengetahuan dan kedisiplinan yang diperlukan (Asrinda & Setiawati, 2022).

Pengangguran terbuka merujuk pada kondisi individu yang mampu bekerja dan aktif dalam mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keinginan mereka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi jumlah tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai ketersediaan di pasar

tenaga kerja, mencerminkan kurangnya pemanfaatan dari pasokan tenaga kerja yang tersedia. (BPS, 2022).

Pengangguran terbuka di suatu wilayah disebabkan oleh pembangunan yang lambat dan tidak merata antara wilayah-wilayahnya (Kuncoro, 1997) dalam (Masruri, 2016). Pertumbuhan penduduk juga dapat menciptakan persaingan yang lebih ketat di pasar tenaga kerja, terutama di sektor-sektor dengan tingkat keterampilan rendah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan upah dan tekanan pada kondisi kerja. Akibatnya, individu yang lebih rentan, seperti pekerja yang kurang terampil, dapat mengalami penurunan pendapatan dan berkontribusi pada ketimpangan pendapatan yang lebih besar.



Sumber : BPS, 2023 data diolah

Gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2018-2022

Dalam data tingkat pengangguran terbuka di Kawasan Gerbangkertosusila tahun 2018 hingga 2022, terdapat perbedaan yang signifikan antara kabupaten dan kota di Kawasan tersebut. Di Kota Surabaya tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2022 dengan angka 7,62%, sedangkan Kabupaten Mojokerto memiliki

tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun yang sama dengan angka 5,05%. Pola yang cukup menarik dapat dilihat di Kota Mojokerto Tingkat pengangguran terbuka cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

Kondisi ini menimbulkan beberapa kekhawatiran terkait ketenagakerjaan di berbagai Kawasan Gerbangkertosusila. Dalam konteks ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikator utama. Wilayah dengan tingkat pengangguran yang terus meningkat, seperti Sidoarjo, bisa mengalami ketimpangan pendapatan yang lebih besar karena banyak orang yang mengalami kesulitan mendapatkan penghasilan yang memadai. Di sisi lain, penurunan tingkat pengangguran, seperti yang terjadi di Surabaya, dapat menyiratkan kemungkinan pengurangan ketimpangan pendapatan karena lebih banyak orang yang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang stabil.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi ketimpangan pendapatan yang cukup besar antar dan dalam wilayah, khususnya antar wilayah di Pulau Jawa (Kataoka, 2018). Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang memberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri kepada pemerintah daerah. Hal ini menciptakan pembagian tanggung jawab yang penting dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi di tingkat daerah. Desentralisasi ini memungkinkan daerah-daerah otonom untuk mengelola potensi ekonomi mereka sendiri dengan lebih efektif, yang pada gilirannya diharapkan akan menyebabkan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah.

Dengan munculnya otonomi daerah, terutama di tingkat kabupaten dan kota, diharapkan pembangunan di tingkat lokal dapat dioptimalkan. Ini mendorong

kabupaten dan kota untuk bekerja sama secara regional untuk meningkatkan daya saing mereka dalam konteks ekonomi global. Dengan demikian, Undang-Undang No 32 tahun 2004 menciptakan peluang bagi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang lebih luas di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang dikenal sebagai Kawasan Gerbangkertosusila, yang meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan dalam wilayah administratifnya. Pembentukan Kawasan Gerbangkertosusila didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No.4/1996 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah (PP) No.47/1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan aturan untuk Kawasan Strategis Nasional ini telah dilakukan melalui Peraturan Presiden (PERPRES) No. 66 Tahun 2022. Salah satu tujuan utama pembentukan kawasan ini adalah untuk mencapai pemerataan pembangunan antar daerah di Jawa Timur.

Sektor ekonomi di Gerbangkertosusila memegang peran besar dalam membentuk PDRB dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan ini menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat vital di Jawa Timur. Pembentukan kawasan Gerbangkertosusila bertujuan untuk menggalakkan regionalisasi dengan penekanan pada kemandirian setiap kabupaten/kota dalam wilayah ini. Kawasan ini juga merupakan kawasan aglomerasi yang signifikan di Provinsi Jawa Timur (Landiyanto, 2005). Dengan adanya Gerbangkertosusila, diharapkan dapat tercipta

koordinasi pembangunan yang lebih baik antarwilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ini akan membawa manfaat bagi perkembangan infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian secara keseluruhan di wilayah ini, serta mendorong kerjasama regional yang lebih erat.

Menurut Montgomery, aglomerasi merujuk pada kecenderungan aktivitas ekonomi untuk berkumpul secara spasial di wilayah perkotaan dengan tujuan untuk memanfaatkan keuntungan dari lokasi yang saling berdekatan dan menghemat biaya yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, yang dikenal sebagai *economies of proximity*.(Kuncoro, 2012).

Aglomerasi merujuk pada fokusnya berbagai kegiatan ekonomi dalam wilayah yang serupa, karena terdapat keterkaitan dan kesamaan di antara mereka, seperti lokasi, sumber daya bahan baku, dan pasar. Marshall memperkenalkan konsep aglomerasi dengan gagasan tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*), juga dikenal sebagai industri yang lokal (*localized industries*). Keputusan untuk menempatkan industri di suatu lokasi untuk jangka waktu yang panjang dipengaruhi oleh adanya *agglomeration economies* dan *localized industries* (Elmariska & Syahnur, 2020).

Pada tahun 2022, sektor industri memainkan peran signifikan dalam kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur, mencapai 30,52%. Ini menunjukkan peningkatan dari kontribusi sektor industri pada tahun sebelumnya yang sebesar 30,25% pada tahun 2021. Peran sektor industri ini memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Kawasan Gerbangkertosusila memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh pada tahun 2022, kota Surabaya berkontribusi sebesar 24,01%, Kabupaten Gresik 6%, dan Kabupaten Sidoarjo 8,98% terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Hal ini menandakan Kawasan Gerbangkertosusila memiliki peran yang besar dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi terutama dari sektor industrinya.

Di kawasan Gerbangkertosusila, sektor industri telah mengalami kemajuan yang signifikan, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah industri baik di dalam maupun di luar kawasan industri, termasuk industri formal besar, menengah, kecil, dan juga industri non-formal (home industry). Kegiatan industri tersebar di beberapa lokasi di wilayah ini, termasuk Surabaya (seperti Kawasan Industri SIER), Sidoarjo (seperti Kawasan Industri Jabon, Waru, dan Tanggulangin), Gresik (seperti Kawasan Industri Manyar, Driyorejo, Karangpilang), dan Mojokerto (seperti Kawasan Industri Ngoro).

Aglomerasi seringkali menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang menarik tenaga kerja, investasi, dan infrastruktur. Di wilayah aglomerasi ini, sektor industri, perdagangan, dan jasa berkembang pesat. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Namun, efek aglomerasi tidak selalu merata, dan ketimpangan pendapatan dapat menjadi konsekuensi. Aglomerasi dalam penelitian ini menggunakan data proporsi PDRB sektor industri kabupaten/kota terhadap PDRB total sektor industri Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2022.

Masalah ketimpangan pendapatan yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang telah menjadi fokus perhatian dalam pengembangan kebijakan selama

beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ketimpangan yang cenderung muncul sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat di simpulkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila?
2. Apakah Aglomerasi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan adanya rumusan masalah diatas, maka dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh aglomerasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila.

3. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila selama periode 2013-2022. Beberapa faktor yang dimasukkan dalam analisis tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat aglomerasi, dan tingkat pengangguran terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak faktor-faktor ini terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi para pengambil keputusan di tingkat pemerintah daerah Gerbangkertosusila. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga serta memberikan masukan yang berguna dalam pembentukan kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya untuk menurunkan tingkat indeks Gini yang ada.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan dalam skala nasional maupun lokal.
3. Penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.